

PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM MENGELOLA CAGAR BUDAYA SITUS WADU PA'A DI KECAMATAN SOROMANDI KABUPATEN BIMA

Jihatul Akbar¹, Handam¹, Ahmad Harakan¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp. 0411-866972 ext.107.Fax.0411-8655888
jihatulakbar@yahoo.co.id, handam@gmail.com, ahmadharakan@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the role of culture and tourism agency in managing cultural heritage Wadu pa'a sites in Soromandi District, Bima Regency. The method used in this research is qualitative descriptive approach. Techniques using qualitative data that all materials, information, and facts that can not be measured and calculated systematically because his form is a description of verbal with this technique the researchers only collected data, information, facts. The data collected from agency of Culture and Tourism Bima. Qualitative research is descriptive research and tend to use analisis with inductive approach. Data collection techniques in this research is observation, interview, and documentation. These results indicate that the role of culture and tourism agency in managing the way Wadu Pa'a cultural sites on the protection form of making drainage b. Namely to increase the development of infrastructure facilities, the utilization of the opportunities open to give life to the community, still less than the maximum it can be seen from the inhibiting factors so that the management of cultural heritage sites Wadu Pa'a still not good.

Keywords: *tourism, government agency, cultural heritage*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dinas kebudayaan dan pariwisata dalam mengelola cagar budaya situs wadu pa'a di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik penelitian ini menggunakan data kualitatif yakni semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena wujudnya adalah keterangan verbal dengan teknik ini peneliti hanya mengumpulkan data-data, informasi-informasi, fakta-fakta dan data dari instansi yang terkait di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bima. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola cara budaya situs wadu Pa'a terkait perlindungan berupa pembuatan drainase b. Pengembangan yaitu peningkatan fasilitas sarana dan prasarana, pemanfaatan adanya peluang terbuka yang di berikan ke masyarakat, masih kurang maksimal hal ini dapat di lihat dari faktor-faktor penghambat sehingga pengelolaan cagar budaya situs Wadu Pa'a masih kurang baik.

Kata Kunci : *pariwisata, dinas pemerintah, cagar budaya*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sangat menjamin kemajuan, pengembangan dan pemeliharaan kebudayaan daerah yang menjadi kekayaan kebudayaan nasional, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1 dinyatakan bahwa, Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya Koentjaraningrat memberikan definisi kebudayaan merupakan sebagai sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 1990: 180).

Kebudayaan memiliki 3 wujud, yaitu : gagasan (wujud real), aktifitas (wujudnya tindakan), dan artefak (wujudnya karya). Salah satu wujud kebudayaan yang berupa artefak adalah cagar budaya, cagar budaya merupakan kekayaan warisan budaya bangsa. Cagar budaya memiliki arti penting untuk ilmu pengetahuan, pengembangan sejarah, kebudayaan, sebagai pembentuk jati diri bangsa, pembentuk persatuan dan kesatuan bangsa, releksasi sebagai kebesaran masa lampau, kekuatan dan sarana untuk memperkokoh rasa cinta tanah air (rasa nasionalisme) dan jati diri bangsa.

Kebudayaan merupakan buah karya atau buah budi manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sementara itu bila di tinjau dari sisi proses, kebudayaan menjadi acuan dalam proses mempermudah manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara memajukan kepribadian, kecerdasan, kreativitas, dan keterampilan manusia supaya dapat menghasilkan karya yang lebih bernilai dari yang sebelumnya. Keberhasilan suatu aktivitas/kemajuan kebudayaan, sangat tergantung kepada sejauh mana pertumbuhan kecerdasan, kreativitas dan keterampilan tersebut dapat di capai secara bersama-sama.

Tinggi dan rendahnya pertumbuhan masyarakat tersebut menentukan tingkat keberhasilan dan proses/kemajuan kebudayaan bagi manusia Indonesia. Ketika akan berlangsung proses kebudayaan, pertama kali kita harus diperhatikan oleh siapa saja yang terlibat dalam proses itu adalah kesiapan

manusianya, sejauh mana tingkat kecerdasannya, bagaimana kepribadiannya, dan sejauh mana kreativitasnya dan keterampilan yang di milikinya. Kesiapan media dan lingkungan sangat penting, tapi semua itu tidak dapat mengeser keutamaan manusia. Kebudayaan nasional Indonesia yang telah tumbuh sejak berabad-abad lalu, memiliki nilai dasar berhubungan dengan latar belakang sejarah dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai dasar dipelihara dan di pertahankan sebagai perwujudan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar yang di maksud adalah : kemerdekaan, kemanusiaan, kemajemukan, kebangsaan, integritas, demokrasi, kemandirian, religious, keseimbangan, kebersamaan, dan kesetaraan.

Oleh karena itu seluruh warga indonesia terutama pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya dan cagar budaya tersebut dengan mengeluarkan payung hukum berupa Undang-Undang, peraturan daerah dan peraturan dalam bentuk lain, melakukan perawatan, pemugaran, dan menyelenggarakan even kebudayaan yang berkerja sama dengan lembaga pendidikan, perawisata, penelitian dan lembaga lainnya.

Pasal 32 Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan "pemerintah memajukan kebudayaan nasional." Setelah terjadi amandemen undang undang dasar negara Republik Indonesia 1945, bunyi pasal tersebut berubah menjadi dua ayat sebagai berikut: (1) negara memajukan kebudayaan nasional indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. (2) negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan budaya nasional.

Dengan adanya perubahan tersebut maka konsekuensinya terjadi pula perubahan kewenangan, kewajiban, dan peran negara khususnya pemerintah didalam memajukan kebudayaan nasional

di tengah peradaban dunia. Amandemen Undang-Undang Dasar pada Pasal 32 tersebut mengharuskan adanya perubahan pada Undang-Undang Tentang Kebudayaan dan peraturan lain di bawahnya. Sampai saat ini terjadi pembaharuan Undang-Undang Tentang Kebudayaan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya perlu di lestarikan keberadaannya karna memiliki nilai penting bagi sejarah, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat terdapat banyak sekali warisan budaya dan cagar budaya yang tersebar luas di berbagai Kecamatan, seperti di desa padende dan desa mbawa kecamatan donggo, desa boro kecamatan sanggar, desa sambori, maria dan kuta kecamatan lambitu serta desa kananta Kecamatan Soromandi. Kecamatan Soromandi adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Daerah ini memiliki cagar budaya situs Wadu Pa'a, Wadu Pa'a adalah bahasa lokal daerah Bima yang terdiri dari dua kata jika diartikan kedalam bahasa Indonesia yaitu Wadu yang artinya Batu sedangkan Pa'a yang artinya Pahat maka arti dari Wadu Pa'a adalah batu pahat yang tepatnya berada di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, situs Wadu Pa'a merupakan objek wisata yang cukup strategis dekat dengan garis pantai dengan pemandangannya yang cukup indah dan nyaman untuk di kunjungi, cagar budaya situs Wadu Pa'a merupakan peninggalan kerajaan nusantara yang pernah berjaya dan menyebar luas di Indonesia dengan misi menyatukan nusantara dan singgah di Kabupaten Bima tepatnya di Kecamatan Soromandi untuk beristerahat pada waktu itu dengan meninggalkan jejak seperti pahatan dan ukiran unik yang menjadi simbol keberadaan mereka bahwa kerajaan nusantara pernah belayar dan singgah di Kabupaten Bima tepatnya di Kecamatan Soromandi.

Seiring berjalannya waktu situs Wadu Pa'a kini mengalami kerusakan itu dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan warisan budaya sehingga warisan budaya dari waktu ke waktu mengalami kerusakan secara fisik. Maka dari itu sudah menjadi tanggung jawab dan keharusan

bersama baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengelola, melestarikan dan menjaga warisan budaya, karena cukup dianggap penting masalah ini perlu adanya suatu pembenahan dan perbaikan dari segi manusia dan aturan dalam pengolaan dan pelestariannya supaya warisan budaya dan cagar budaya tersebut dapat terjaga sampai berabad-abad berikutnya dan dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya.

Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dinilai masih kurang maksimal mengelola dan melestarikan warisan budaya dan cagar budaya, karna masih dapat ditemukan warisan budaya dan cagar budaya yang masih kurang terawat sehingga benda cagar budaya mengalami kerusakan secara alami atau karena ulah tangan manusia.

Oleh karena itu dengan penting dipandang permasalahan yang telah di uraikan untuk melaksanakan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran dinas kebudayaan dan pariwisata dalam mengelolah cagar budaya situs Wadu Pa'a di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dan faktor-faktor apa yang mendorong peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelolah cagar budaya situs Wadu Pa'a di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.

B. KONSEP PERAN

Peran dapat diartikan sebagai prilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berprilaku. Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggungungan peran berprilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan prilaku peran yang diinginkan berjalan seiring pekerjaan

tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan. Peranan adalah aspek dinamis kedudukan, perangkat hak-hak dan kewajiban-kewajiban, perilaku aktual dari pemegang kedudukan, bagian dari aktifitas yang dimainkan seseorang. Tingkah laku seseorang yang memainkan suatu kedudukan tertentu itulah yang disebut sebagai peranan sosial (Koentjaraningrat, 1990:136).

Pengertian yang lain dikemukakan oleh Polak dalam Tuti (2003:9) yang berpendapat : “peranan atau *role* adalah suatu kelakuan yang diharapkan dari oknum dalam antar hubungan sosial tertentu yang berhubungan dengan status tertentu”. Menurut istilah manajemen, peran adalah harapan tentang perilaku yang patut bagi pemegang jabatan tertentu dalam organisasi, khususnya menyangkut fungsi dan tugas yang dilaksanakan sehingga keberadaan organisasi atau lembaga yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan status berarti dilakukan dengan menjalankan peranan.

Menurut Soejono (1993:243) peran adalah aspek dinamis dari kedudukan tertentu (*status*) apabila seseorang melaksanakan hak-hak tertentu serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia dikatakan menjalankan perannya. Biasanya dalam suatu organisasi dibentuk suatu kerja yang dilakukan kegiatan pengelolaan suatu sumber daya manusia dan satuan kerja tersebutlah yang secara fungsional bertanggung jawab dalam melakukan berbagai kegiatan dan mengambil berbagai langkah dalam manajemen sumber daya manusia terdapat alasan yang kuat mengapa satuan kerja fungsional demikian perlu dibentuk. Pertama, meskipun bahwa setiap menejer yang bersangkutan disertai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan-kegiatan lain, baik yang bersifat tugas pokok maupun tugas penunjang, sehingga perhatian utama ditujukan kepada tanggung jawab fungsional itu. Kedua dewasa ini manajemen sumber daya manusia mutlak perlu ditangani secara fungsional.

C. PENGERTIAN PEMERINTAH

Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan sebagai pemerintah adalah sebagai kekuasaan yang

memerintasi suatu negara atau badan tertinggi suatu kabinet merupakan suatu pemerintah secara *etimologis* dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (*kontinu*) atau kebijakan dengan menggunakan sesuatu rencana maupun akal (*rasio*) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan yang dikehendaki Soemantri dalam Rahman (2014:17)

Sedangkan menurut Sayre dalam Kencana (2005:6), mengatakan bahwa: *Government is best at the organized agency of the state, expressing and exercising its authority*. Maksudnya pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya, dalam hal ini terhadap rakyatnya secara keseluruhan.

Menurut Wilson (dalam Syafii, 2002:12) pemerintah pada akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau kelompok orang dari sekian banyak kelompok.

Sedangkan yang diketahui dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari urusan kekuasaan. Bahkan menurut Kuper Dalam Muhadam (2011:31) istilah *government* (pemerintah) dan segala bentuk aplikasinya merupakan jantung dari ilmu studi politik. Sedangkan pemerintah menurut Finer Dalam Muhadam (2011:14) setidaknya menunjukkan empat pengertian pokok yaitu *pertama* pemerintah merujuk kepada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan yang sah, *kedua* istilah pemerintah menunjuk pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung, *ketiga* pemerintahan menunjuk secara langsung proses yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan, *keempat* pemerintah juga dapat mengacu pada aspek dan bentuk, metode atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat yakni struktur dan pengelolaan badan

pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

D. TUGAS PEMERINTAH DALAM MENGELOLA CAGAR BUDAYA

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya ketentuan umum ayat 1 Nomor 21, pengelolaan berarti upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Peraturan, pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengkajian, perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan di bidang kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan museum. Pada pengelolaan cagar budaya agar tetap lestari terdapat 3 upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah sebagai daerah yang otonom, yaitu: (1) Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya. (2) Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian. (3) Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Ketentuan Umum pasal 1 ayat 23, 29, 33).

Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 semangat otonomi daerah dalam pengelolaan cagar budaya agar tetap lestari, yaitu sebagai berikut: (1) Mekanisme register nasional cagar budaya, mulai dari tahap pendaftaran, pengkajian, dan penetapan warisan budaya yang berwujud untuk ditetapkan sebagai cagar budaya atau tidak. (2) Pola hubungan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam menyampaikan hasil penetapan cagar budaya termasuk dalam hal penghapusan

cagar budaya. (3) Pengelolaan register nasional cagar budaya.

(4) Peningkatan status cagar budaya, dalam kaitannya dengan kriteria, intervensi penanganan, dan pengelolaan suatu cagar budaya di masing-masing tingkatan wilayah kewenangan. (5) Sistem zonasi dalam perlindungan cagar budaya sesuai dengan tingkatan kewenangannya. Melibatkan partisipasi masyarakat, mulai dari tahap pendaftaran, pengkajian, dan penetapan cagar budaya baik sebagai kelompok pendaftar maupun sebagai tim ahli cagar budaya. Disamping itu, masyarakat juga terlibat dalam kegiatan pelestarian secara aktif yaitu perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan, maupun pengawasan cagar budaya. Masyarakat dapat memiliki dan menguasai cagar budaya. Warisan budaya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak baik sebagai identitas, penguatan jati diri, dan kesejahteraan masyarakat.

E. PENGERTIAN PENGELOLAAN

Menurut Wadoryo (1980:41) definisi pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian, pengerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Pengelolaan adalah substansi dari mengelola. Sedangkan mengelola berarti tindakan yang di mulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai pengawasan dan penilaian.

Soewarno (2002:378) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian atau penyelenggaraan sebagai sumber daya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran. Dari uraian di atas dapatlah di simpulkan bahwa yang di maksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian, pengerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang di

miliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang di tentukan.

Terry (2000:21) mengatakan bahwa kegiatan atau fungsi pengelolaan, meliputi: perancangan *planning*, pengorganisasian *organizing*, pelaksanaan *actuating*, dan evaluasi *evaluating*.

Perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempa, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan dan bagaimana tata cara mencapai tujuan. Dengan demikian kunci keberhasilan dalam suatu pengelolaan atau manajemen tergantung atau letak perencanaannya. Sebuah perencanaan yang baik adalah yang rasional, dapat di laksanakan dan menjadi panduan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, perencanaan tersebut sudah mencapai permulaan perkerjaan yang baik dari suatu proses pencapaian tujuan organisasi.

F. KONSEP PARIWISATA

Menurut Idris Abdurachman (1998:71) objek wisata adalah segala objek yang dapat menimbulkan daya tarik bagi para wisatawan untuk dapat mengunjunginya. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan objek wisata, diantaranya:

Wisatawan menurut Yoeti (1995:21) diartikan sebagai seorang, tanpa membedakan ras, kelamin, bahasa, dan agama, yang memasuki wilayah suatu negara yang mengadakan perjanjian yang lain dari pada Negara dimana orang itu biasanya tinggal dan berada di situ kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 6 bulan, dalam rangka waktu 12 bulan berturut-turut, untuk tujuan non-imigran yang legal, seperti perjalanan wisata, rekreasi, olahraga, kesehatan, alasan keluarga, studi, ibadah keagamaan, atau urusan usaha (*business*).

Adapun perjalanan dapat digolongkan kedalam klasifikasi berikut ini: (1) Aktraksi wisata biasanya berwujud pariwisata, kejadian, baik secara periodik, atau pun sekali saja baik yang bersifat tradisional, maupun yang telah di lembagakan dalam kehidupan masyarakat modern, kesemuanya itu mempunyai daya tarik yang positif kepada para wisatawan untuk mengunjungi, menikmati, sehingga memberikan

kepuasan maksimal bagi motif-motif parawisatawan yang telah bergerak untuk mengunjunginya.

(2) Daya tarik wisata selain ada objek dan aktraksi wisata suatu daerah tujuan wisata juga harus mempunyai daya tarik. Suatu daya tarik wisata harus mempunyai tiga syarat, yaitu : ada sesuatu yang dapat dilihat (*something to see*), ada sesuatu yang dapat dikerjakan (*something to do*), Ada sesuatu yang dapat dibeli (*something to buy*).

Ketiga syarat ini merupakan unsur-unsur untuk mempublikasikan pariwisata. Seorang wisatawan yang datang ke suatu daya tarik wisata dengan tujuan untuk meperoleh manfaat dan kepuasan. Manfaat dan kepuasan tersebut dapat di peroleh apa bila suatu daya tarik wisata mempunyai daya tarik.

G. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini yaitu di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bima, penentuan lokasi ini adalah didasari atas pertimbangan peneliti dengan alasan karena wilayah ini sangat tepat untuk mengambil suatu informasi yang kongkrit dalam hal pengelolaan cagar budaya situs Wadu Pa'a.

Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang pengelolaan cagar budaya yang terjadi di tempat kejadian. Tipe penelitian yang dilakukan menggunakan analisis kualitatif, dimana pertanyaan "bagaimana" menjadi permasalahan utama untuk menjawab semua permasalahan yang diangkat dan diteliti, oleh sebab itu untuk menggambarkan atau menjelaskan sesuatu hal yang kemudian yang diklarifikasikan sehingga dapat diambil satu kesimpulan, kesimpulan tersebut dapat lebih mempermudah dalam melakukan penelitian dan pengamatan.

H. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kabupaten Bima memiliki dinas-dinas yang menunjang

penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Disbudpar merupakan unsur pelaksanaan pemerintahan daerah. Disbudpar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bima. Untuk menyelenggarakan tugasnya. Disbudpar mempunyai beberapa fungsi : Perumusan kebijakan teknis kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati, pengkordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas kebudayaan dan pariwisata, melaksanakan tugas teknik operasional di bidang kebudayaan dan pariwisata dalam pengkordinasian hubungan lembaga, informasi daerah yang meliputi promosi daerah, pemberdayaan kebudayaan dan pariwisata yang meliputi objek, sarana, dan bina masyarakat wisata, rekreasi, hiburan umum, akomodasi, dan rumah makan serta seni budaya yang mencakup kesenian, sejarah, dan nilai tradisonal serta kepemusiuman dan kepurbakalaan, penyelenggaraan, dan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan rencana dan pelaporan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum, melaksanakan pengalihan potensi budaya, dan pariwisata sebagai komoditi penunjang pendapatan asli daerah (PAD) pelaksanaan pembinaan terhadap sumberdaya manusia (SDM) pelaksanaan promosi daerah dan pengembangan seni budaya dan pariwisata.

Dalam berbagai literatur sejarah, Situs Wadu Pa'a merupakan salah satu situs Candi Tebing yang memiliki nilai historis yang cukup tinggi. Wadu Pa'a merupakan tempat pemujaan agama Budha, atau mengandung unsur Budha dan Siwa. Hal itu diperkuat dengan ditemukannya Relief Ganesha, Mahaguru, Lingga-Yoni, relief Budha (Bumi Sparsa Mudra), termasuk stupa yang menyerupai bentuk stupa Goa Gajah bali atau stupa-stupa di Candi Borobudur yang berasal dari abad X. Hal itu didukung dengan terteranya Candrasangkala pada prasasti yang berbunyi Saka Waisaka Purnamasidi atau tahun 631 Caka yang disesuaikan dengan tahun 709 Masehi. Ukiran-ukiran pada Wadu Pa'a mempunyai nilai seni

ukir yang sangat tinggi, karena media ukirannya bukan di batu biasa akan tetapi tebing-tebing batu. Menuju Wadu Pa'a sangatlah mudah karena dari Sila ke Soromandi, kita tidak menemui kendala yang mengharuskan kita kesasar dengan jalan yang berliku-liku, kita hanya mengikuti jalan satu arah sampai ke Wadu Pa'a.

Situs ini terdiri dari dua tempat. Di tempat I terdapat relief stupa seperti stupa yang memakai Catra (Payung) bersusun dua dan stupa catra tunggal, relief stupa bercabang tiga, relief Mahaguru, Ganesha, Arca sebatas Dada, selain relief Budha dengan sikap duduk bersila diatas bunga Padma bertangkai, berikut pahatan prasasti. Dibawah Agastya tampak juga pahatan berbentuk Lingga- Yoni. Sementara itu di tempat II yang berjarak 200 meter dari tempat I, terdapat deretan stupa yang memakai payung yang alasnya meyerupai bentuk persegi maupun silinder dan relief berbentuk pilar mendominasi lokasi.

Wadu Pa'a merupakan sebuah situs peninggalan sejarah yang di jadikan tempat wisata tepatnya berada di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Setus Wadu Pa'a ini memiliki nilai keindahan tersendiri dengan letaknya yang strategis berada di garis pantai, di tambah udaranya yang lebih sejuk, lingkungannya yang asri dan nyaman. Dengan kondisi seperti memungkinkan wisatawan yang berkunjung ke situs wadu Pa'a ini banyak, sehingga situs wadu Pa'a ini bisa lebih terawat agar bisa menyedot perhatian wisatawan lebih banyak lagi.

1. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bima

Perlindungan warisan budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, keberlanjutan dan nilai-nilai yang melekat padanya dan diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan warisan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keterlibatan

masyarakat mulai mendapat perhatian, dengan diberi kesempatan untuk terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan cagar budaya seperti pernyataan oleh kabid informasi kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bima sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan kabid informasi kebudayaan yaitu:

"Kami mengupayakan perbaikan dan perlindungan dengan melibatkan masyarakat di sekitar tempat wisata cagar budaya situs Wadu Pa'a, dengan membuat drainase atau talud agar air hujan turun langsung ke laut dan tidak mengenai situs Wadu Pa'a, karena mengingat situs Wadu Pa'a sekarang telah mengalami kerusakan yang cukup serius. Dan kami telah meminta bantuan pemerintahan pusat agar menyuplai dana untuk melestarikan kembali wisata cagar budaya situs wadu Pa'a, agar wisata situs Wadu Pa'a makin banyak di minati oleh banyak wisatawan lagi" (wawancara, MF)

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan informan diatas dapat di analisis bahwa ada upaya perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bima dengan melibatkan masyarakat sekitar tempat wisata cagar budaya situs Wadu Pa'a, walau dengan dana yang terbatas tapi masih ada upaya untuk melestarikan kembali cagar budaya situs Wadu Pa'a.

Senada dengan yang di kemukakan oleh kabid kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bima sebagai berikut yaitu:

"Sebagai pemerintah yang bertanggung jawab bertugas untuk melestarikan kebudayaan kami melakukan kordinasi dan komunikasi terhadap masyarakat agar berkerjasama dengan kami, karena cagar budaya situs Wadu Pa'a merupakan warisan budaya yang memiliki nilai luhur yang harus di jaga kelestariannya, akan tetapi masih terkendala dana untuk memperbaiki fasilitas yang ada, selain melakukan kordinasi dan komunikasi dengan masyarakat kami juga mengupayakan kordinasi dan komunikasi kepada pemerintahan pusat, untuk itu

selagi pemerintah pusat sekarang hadir di acara tambora menyapa dunia maka kami berupaya semaksimal mungkin untuk mengajak pemerintah pusat untuk melihat keindahan alam Kabupaten Bima termaksud situs Wadu Pa'a yang terletak di Kecamatan Soromandi" (wawancara, KH)

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan informan diatas dapat di analisis bahwa sejauh ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bima telah aktif melakukan kordinasi dan komunikasi dengan masyarakat dan pemerintah untuk meminta bantuan melestarikan dan melindungi situs Wadu Pa'a.

Senada dengan juru kunci situs Wadu Pa'a mengungkapkan hal yang sama seperti pernyataannya sebagai berikut: Hasil wawancara penulis dengan juru kunci yaitu:

"Saya sebagai pegawai negeri yang di tugaskan untuk menjadi juru kunci situs Wadu Pa'a, mengajak masyarakat di sekitar situs Wadu Pa'a untuk ikut berpartisipasi mengelola dan melindungi lingkungan sekitar wisata cagar budaya situs Wadu Pa'a akan tetapi terkendala dana yang di keluarkan pemerintah masih kurang, sehingga upaya perlingan situs Wadu Pa'a masih kurang baik, bahan yang di butuhkan seperti semen, batu, pasir dan lain-lain masih belum cukup, karena untuk membuat talud di butuhkan alat dan bahan yang cukup agar cagar situs Wadu Pa'a tidak terkikis terkena air hujan yang turun dari gunung" (wawancara, SJ).

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya partisipasi masyarakat melindungi dan melestarikan cagar budaya situs Wadu Pa'a, walau dengan dana seadanya akan tetapi ada upaya untuk menghindari terjadinya kerusakan cagar budaya situs Wadu Pa'a.

Fakta yang sama diungkap oleh salah

satu tokoh masyarakat sekitar wadu Pa'a yang menyatakan bahwa:

"Kami sebagai warga masyarakat di sekitar wisata cagar budaya Wadu Pa'a hanya bisa membantu melindungi cagar budaya situs Wadu Pa'a dengan tenaga yang kami miliki, kami senang berkerja sama dengan pemerintah karena cagar budaya situs Wadu Pa'a merupakan peninggalan sejarah yang harus di lindungi untuk kepentingan bersama"(wawancara, T).

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan informan diatas dapat di simpulkan bahwa adanya partisipasi masyarakat setempat dalam melindungi cagar budaya situs Wadu Pa'a. Berikut juga hasil wawancara masyarakat sekitar cagar budaya mengatakan bahwa:

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu:

"Sebagai tokoh masyarakat di sekitar cagar budaya situs Wadu Pa'a kami sangat antusias terhadap pemerintah yang mengupayakan kebugaran kembali situs wadu pa'a, kami melibatkan diri untuk memperbaiki dan melindungi cagar budaya situs Wadu Pa'a, karena situs Wadu Pa'a merupakan bagian dari kami, sudah menjadi keharusan bersama untuk bertanggung jawab melindunginya dari kerusakan"(wawancara, Y).

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan informan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa, masyarakat menganggap diri bahwa cagar budaya situs Wadu Pa'a merupakan bagian dari mereka, dan sudah menjadi keharusan bagi setiap generasi untuk melindunginya.

Berikut hasil wawancara penulis dengan pengunjung situs Wadu Pa'a terkait perlindungan dan adanya partisipasi masyarakat melindungi cagar budaya situs Wadu Pa'a mengatakan bahwa:

Hasil wawancara dengan pengunjung yaitu:

"Sejauh ini saya kurang tahu tentang kerja sama masyarakat dengan pemerintah untuk melindungi cagar budaya situs Wadu Pa'a, akan tetapi di sana saya melihat drainase atau talud yang di buat di atas situs Wadu Pa'a, tapi baguslah kalau

memang ada kerja sama yang terjalin oleh pemerintah dan masyarakat demi melindungi cagar budaya situs Wadu Pa'a" (Wawancara, FR).

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan informan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa pengunjung tidak terlalu tahu tentang kerja sama yang terjalin antara masyarakat dan pemerintah akan tetapi cukup bagus apa bila keduanya berkerja sama.

Hasil wawancara dengan pengunjung yaitu:

"Perlu diketahui pemerintah seharusnya melakukan perlindungan ekstra terhadap situs Wadu Pa'a, karena Wadu Pa'a bukan hanya tempat untuk berwisata, akan tetapi situs Wadu Pa'a memiliki nilai sejarah peninggalan masa lampau, ini bukti sejarah bahwa leluhur kita pernah mempercayai animisme dan dinamisme, maka dari itu kita harus menjaga bersama peninggalan bersejarah situs Wadu Pa'a ini" (wawancara, K).

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan informan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa pengunjung meminta kepada pemerintah agar lebih memperhatikan dengan baik kondisi cagar budaya situs Wadu Pa'a.

Merangkum dari semua hasil wawancara penulis dengan informan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pernyataan pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan kenyataan yang didapatkan penulis dari tokoh masyarakat dan pengunjung cagar budaya situs Wadu Pa'a, komunikasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan masyarakat sangatlah efektif. Masih banyak kekurangan yang di hadapi untuk mengupayakan perlindungan, maka dari itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah mengupayakan komunikasi lanjutan terhadap pemerintahan pusat terkait perlindungan cagar budaya situs Wadu Pa'a, dengan demikian pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Bima telah menjalankan perannya dalam hal perlindungan cagar budaya situs Wadu Pa'a.

Sebagian besar pemanfaatan cagar budaya di Indonesia adalah digunakan untuk kegiatan pariwisata, dan kegiatan pariwisata perlu pengembangan yang terus menerus agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Wisatawan memegang peranan penting dalam mengembang kanpotensi kepariwisataan disuatu daerah, karena pengembang harus berpedoman kepada apa yang dicari oleh wisatawan. Pengembangan pariwisata memerlukan pengelolaan yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan.

Hasil Wawancara dengan kabid kebudayaan yaitu:

"Sebagai pemerintah kami mengupayakan pengembangan secara kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di tempat wisata situs wadu Pa'a, karena selama ini penyediaan sarana dan prasara di situs Wadu Pa'a ini belum memadai, masih terbatas fasilitas penting seperti penginapan, toilet, kamar ganti, tempat istirahat dan mushollah untuk pengunjung yang datang di situs Wadu Pa'a, karena di butuhkan sarana dan prasarana yang baik untuk menarik minat wisatawan untuk berkuncung ke cagar budaya situs Wadu Pa'a"(wawancara, KH).

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan informan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bima memiliki inovasi yang modern untuk mengembangkan sarana dan prasarana yang memadai demi menarik banyak pengunjung cagar budaya situs Wadu Pa'a.

Hal yang sama di ungkapkan oleh kabid informasi kebudayaan terkait masalah pengembangan pariwisata situs Wadu Pa'a yaitu:

"Ketika mau berpergian ke situs Wadu Pa'a memang terkendala oleh jalan yang kurang baik, maka kami akan berkerja sama dengan dinas perkerjaan umum (PU) untuk membuat jalan menuju situs Wadu Pa'a, karena jalan adalah salah satu faktor pendukung yang memudahkan kita untuk berwisata, maka dari itu kami pihak pengelola harus memperhatikan apa yang

di butuhkan dan yang di inginkan oleh pengunjung dalam hal ini kami harus memperhatikan akses jalan agar pengunjung tidak kesulitan untuk ke situs Wadu Pa'a" (wawancara, MF).

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan informan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berupaya untuk melakukan pengembangan mulai dari penyediaan fasilitas sarana dan prasarana sampai memperbaiki jalan guna memudahkan pengunjung untuk pergi ke cagar budaya situs Wadu Pa'a.

Senada dengan pernyataan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juru kunci cagar budaya situs Wadu Pa'a juga mengeluarkan pendapat bahwa ada upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di sekitar situs Wadu Pa'a seperti berikut yaitu:

Hasil wawancara juru kunci situs Wadu Pa'a

"Selama saya berkerja di sini, saya selalu berupaya memperbaiki fasilitas yang rusak, seperti memperbaiki pagar, mengecat tembok, dan memperbaiki tempat untuk berteduh di sekitar situs Wadu Pa'a, saya juga selalu memberitahukan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kalau seandainya ada fasilitas yang rusak, baik itu karena ulah manusia atau karena termakan jaman karena mengalami pelapukan"(wawancara, SJ).

Dari hasil observasi dan wawancara penulisdengan informan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa sejauh ini juru kunci situs Wadu Pa'a selalu mengkomunikasikan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kalau seandainya ada fasilitas sarana dan prasarana yang rusak maka akan ada upaya untuk perbaikan kembali fasilitas di sekitar cagar budaya situs Wadu Pa'a.

Namun pernyataan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak sesuai

dengan pernyataan pengunjung. Sebagaimana hasil wawancara dengan pengunjung yang mengatakan:

"Saya sering ke situs wadu Pa'a memang suasana alamnya asri dan nyaman, pantainya cukup indah karena letak situs wadu Pa'a dekat dengan garis pantai, akan tetapi tidak ada perubahan yang berarti dari dulu hingga sekarang, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana kurang memadai, tidak ada tempat penginapan, tidak ada mushollah dan akses jalan kurang bagus, tidak ada tempat untuk bersantai-santai, kami hanya di manjakan oleh alam yang masih alami, tempat untuk duduk sembarang tempat istirahatnya di situ nyaman di situ aman" (wawancara, FR).

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan informan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa penyediaan sarana dan prasara di situs Wadu Pa'a belum ada sama sekali karena saya sendiri melihat kondisi di lokasi penelitian tidak ada perubahan sama sekali. Begitu pula pernyataan pengunjung yang lain hampir sama pernyataannya bahwa sarana dan prasara di sekitar situs Wadu Pa'a masih kurang.

Hasil wawancara dengan pengunjung yaitu:

"Tidak ada perubahan sama sekali di situs Wadu Pa'a, kalau mandi di air laut harus ada kamar ganti, ini tak ada sama sekali, mau BAB saja kita harus cari jauh dari tempat keramaian itu di karenakan WC tidak ada di sekitar situs Wadu Pa'a, tapi walaupun begitu kami tetap mengfavoritkan situs wadu Pa'a ini walau tidak ada fasilitas tapi mampu menghipnotis kami pengunjung" (wawancara, AA).

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan informan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penyediaan tempat untuk keperluan pengunjung sama sekali belum ada.

Masih belum lengkap pernyataan dari semua informan maka penulis mencari informasi kepada masyarakat sekitar situs Wadu Pa'a. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

"Melihat kondisi lokasi wisata cagar

budaya situs Wadu Pa'a sekarang sudah sangat memprihatinkan, jembatan untuk berlabuhnya bot pengunjung kini telah hancur, kami masyarakat sudah mendiskusikan terkait masalah pengembangan wisata cagar budaya situs Wadu Pa'a dengan pemerintah yang terkait, lagi-lagi masih kurangnya dana untuk mengembangkan tempat wisata ini, jadi kami hanya bisa membantu dengan tenaga seadanya agar pengunjung masih mau mengunjungi tempat wisata cagar budaya situs Wadu Pa'a ini" (wawancara, SS).

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan informan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa masyarakat berupaya membantu pemerintah mengembangkan wisata cagar budaya situs Wadu Pa'a akan tetapi upaya tersebut masih terkendala oleh dana.

Senada dengan wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu:

"Memang untuk mengembangkan tempat wisata yang berstandar, di perlukan fasilitas yang cukup memadai untuk menarik banyak pengunjung wisata, akan tetapi di balik itu semua di perlukan modal yang cukup besar, maunya kami sebagai masyarakat ada investasi dari pihak swasta untuk mengelola cagar budaya ini, akan tetapi itu hanya harapan saja, agar wisata ini terjaga kelestariannya dengan baik" (wawancara, YA).

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan informan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa masyarakat memiliki harapan agar pihak swasta mau dilibatkan untuk mengelola cagar budaya situs Wadu Pa'a.

Merangkum dari semua hasil wawancara diatas terkait pengembangan pariwisata cagar budaya Wadu Pa'a maka penulis menyimpulkan bahwa pernyataan pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan kenyataan yang didapatkan penulis dari

tokoh masyarakat, juru kunci dan pengunjung cagar budaya situs Wadu Pa'a, bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya memperbaiki fasilitas yang ada dengan dana yang terbatas, maka dari itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bima telah menjalankan perannya sebagai pengembangan sarana dan prasarana di sekitar situs wadu pa'a waulu dengan keadaan dana yang terbatas.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2010 pada pasal 85 disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar budaya yang dilakukan oleh setiap orang berupa ijin pemanfaatan, dukungan tenaga ahli pelestarian, dukungan dana /pelatihan.

Hasil wawancara kabid informasi kebudayaan yaitu:

"Disitus Wadu Pa'a kami memberikan peluang masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan peluang yang ada, seperti pemungutan biaya masuk dan biaya parkir di situs Wadu Pa'a, semua kami sudah limpahkan ke masyarakat, tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkannya dengan baik peluang yang ada" (wawancara, MF).

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan informan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah memberikan lapangan/lahan kerja bagi masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan peluang di berikan, tinggal bagaimana masyarakat secara kolektif memanfaatkan peluang yang ada.

Berikut hasil wawancara dengan kabid kebudayaan, mengatakan bahwa:

"Kami selaku pemerintah selalu memperhatikan masyarakat, dan mengikut sertakan masyarakat dalam mengelola cagar budaya situs Wadu Pa'a, karena memang pemasukan dari hasil pemungutan ditempat wisata itu untuk kesejahteraan masyarakat, jadi kami selalu turut sertakan masyarakat untuk mengola dan melestarikan tempat wisata cagar budaya

situs Wadu Pa'a" (wawancara, KH).

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan informan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam mengelola tempat wisata cagar budaya situs Wadu Pa'a demi kesejahteraan masyarakat.

Berikut hasil wawancara penulis dengan juru kunci situs Wadu Pa'a sebagai berikut:

"Masyarakat cukup antusias menerima pelimpahan tanggung jawab untuk mengelola cagar budaya situs Wadu Pa'a, maka dari itu masyarakat harus berkerja aktif untuk mengelola dengan baik pelimpahan yang di berikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, karena pemasukan dari hasil pemungutan biaya itu semua untuk masyarakat sekitar" (wawancara, SJ).

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan informan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa masyarakat harus berkerja aktif untuk melestarikan dan memanfaatkan peluang yang di limpahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Senada dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

"Memang benar apa yang di katakan oleh pemerintah Kabupaten Bima yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mereka memberikan peluang terhadap masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan peluang yang mereka berikan terhadap kami, ketika saat libur parawisatawan banyak mengunjungi situs wadu Pa'a ini, apalagi saat lebaran pengunjung sangatlah banyak, maka dari itu kami dan kelompok masyarakat lainnya berkerja sama melayani pengunjung yang datang di situs wadu Pa'a ini" (wawancara, TA)

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan informan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa memang ada peluang terbuka yang di berikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada masyarakat di sekitar situs wadu Pa'a untuk mengelola dan memanfaatkan dengan baik.

Sebagaimana yang di katakan pula oleh salah satu informan terkait situs Wadu Pa'a salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

"kami selaku tokoh masyarakat di sekitar situs Wadu Pa'a menerima dengan baik peluang yang di berikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada kami untuk memanfaatkan tempat wisata cagar budaya situs Wadu Pa'a yaitu dengan menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar, agar pengunjung merasa nyaman dan aman saat berada di tempat wisata cagar budaya situs Wadu Pa'a" (wawancara, TA).

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan informan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa adanya keterlibatan masyarakat untuk melestarikan cagar budaya situs Wadu Pa'a agar pengunjung merasa nyaman.

Begitu pula yang dikatakan oleh pengunjung cagar budaya situs Wadu Pa'a berikut ini yang mengatakan bahwa:

"Di situs Wadu Pa'a biasa saya di pungut biaya, dari biaya masuk dan biaya parkir, kalau untuk biaya masuk ke situs Wadu Pa'a biasa saya bayar Rp.5000 terus untuk biaya parkir Rp.5000, akan tetapi keamanan dan penjagaan di situs Wadu Pa'a masih kurang, saya takut motor saya hilang karena masyarakat hanya memungut biaya saja tanpa adanya perlindungan, harapan saya kalau bisa di buat aturan seperti jaminan ketika barang-barang hilang atau memperketat penjagaan di sekitar situs wadu Pa'a" (wawancara, KA).

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan informan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa adanya pemungutan biaya masuk yang di tempat wisata cagar budaya situs Wadu Pa'a, akan tetapi harapan pengunjung

yaitu meningkatkan keamanan dan aturan agar pengunjung merasa nyaman.

Senada dengan pengunjung di atas Sebagaimana yang di katakan pula oleh salah satu informan terkait situs Wadu Pa'a salah satu pengunjung lainnya mengatakan bahwa:

"Memang di sekitar situs Wadu Pa'a banyak orang-orang yang menjaga pintu masuk dan tempat parkir untuk meminta tarif masuk dan parkir, tapi itu sangat sesuai selagi itu untuk keaman dan kenyamanan pengunjung, akan tetapi di perlukan ke amanan yang ketat lagi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, maka dari itu masyarakat juga harus aktif menjaga keamanan di sekitar situs Wadu Pa'a" (wawancara, FR).

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan informan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa harapan pengunjung yaitu di tingkatkan lagi penjagaan untuk keamanan bersama. Merangkum semua pernyataan informan di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam hal pemanfaatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bima memang benar-benar melibatkan masyarakat dalam mengelola cagar budaya situs wadu Pa'a, akan tetapi masih ada harapan dari pengunjung untuk meningkatkan pengamanan, perlindungan dan aturan sehingga ada jaminan bagi pengunjung.

1. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengelolaan Cagar Budaya Situs Wadu Pa'a

Faktor pendukung adalah faktor yang mendukung pengelolaan cagar budaya situs Wadu Pa'a adalah : (1) Pemandangan alam yang eksotis disepanjang garis pantai situs wadu Pa'a ini memiliki pemandangan memukau yang mampu menghipnotis para wisatawan yang berkunjung, karna pesona alamnya sangatlah indah memanjakan mata. Seperti yang di katakana oleh kabid kebudayaan. (2) Lingkungan sekitar situs Wadu Pa'a

yang baik, Situs Wadu Pa'a memiliki lingkungan yang cukup asri dan nyaman, berangin sejuk, udaranya segar belum terjamah polusi, tidak terganggu kebisingan kendaraan yang berlalu-lalang, situs wadu Pa'a ini cocok untuk menenangkan diri menyejukan jiwa dari masalah dan persoalan lainnya yang memberatkan pikiran. (3) Sikap masyarakat di sekitar situs Wadu Pa'a, hal ini paling penting dalam setiap tempat wisata, dikarenakan apa bila disekitar tempat wisata masyarakatnya ramah dan baik maka akan makin banyak pengunjung yang berniat untuk datang ke situs Wadu Pa'a, sebaliknya apa bila masyarakat tidak ramah dan tidak baik maka wisatawan tidak akan betah dan tidak akan nyaman.

Faktor penghambat adalah faktor yang menghambat pengelolaan cagar budaya situs Wadu Pa'a adalah (1) Jalan menuju situs wadu Pa'a sulit Situs Wadu Pa'a yang merupakan objek wisata, tidak luput dari kekurangan dan kelemahan, dalam hal ini situs Wadu Pa'a masih menemukan kesulitan akses jalan, akses jalan menuju situs Wadu Pa'a ini sulit terkendala karena jalannya yang rusak, infrastukturnya yang kurang baik. Dalam hal ini perlu perhatian lebih pemerintah Kabupaten Bima agar kiranya mengkoordinasi dinas-dinas terkait, agar wisatawan tidak terkendala mengakses jalan menuju situs Wadu Pa'a. (2) Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai. Secara kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di tempat wisata situs wadu Pa'a belum memadai, masih terbatas fasilitas penting seperti penginapan, toilet, kamar ganti, tempat istirahat, toko dan mushollah. (3) Sistem promosi yang kurang baik saat ini tempat wisata situs Wadu Pa'a belum terlalu banyak yang tahu, karena promosi untuk wisata situs wadu Pa'a kurang baik, tidak ada situs resmi dari pemerintah atau pengelolaan atau sabagainya.

I. PENUTUP

Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola cara budaya situs wadu Pa'a di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima adalah perlindungan berupa pembuatan talud atau drainase di sekitar cagar budaya situs Wadu Pa'a dengan dana yang terbatas, pengembangan yaitu peningkatan fasilitas sarana dan

prasarana wisata cagar budaya situs Wadu Pa'a dan pemanfaatan adanya peluang terbuka yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi mematok tarif masuk dan menyediakan tempat parkir.

Pemerintah dalam hal ini pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan pengelolaan cagar budaya situs Wadu Pa'a harus sungguh-sungguh melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dalam melakukan perlindungan terhadap cagar budaya situs wadu Pa'a. Diperlukan kerja nyata dengan melakukan kordinasi dan komunikasi dengan dinas-dinas yang lain untuk mengadakan sarana dan prasarana fasilitas pendukung untuk mengembangkan pariwisata cagar budaya situs wadu Pa'a. Di perlukan pelatihan khusus bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya situs wadu Pa'a dengan aturan dan jaminan keamanan bagi pengunjung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, Idris. 1998. *Visions For Global Toursm Industry : Creating and Sustaining Compertitive Strategies*. Bandung : Rajawali Press.
- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- David, Fred R. 2004. *Manajemen Strategi : Konsep*. Jakarta : PT. Indeks.
- Hamdi, Muchlis. 2002. *Bunga Rampai Pemerintahan*, Jakarta : Yarsif Watampone.
- Syafii, Inu Kencana. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- , 2005. *Manajemen Pemerintahan*, Bandung: Refika Aditama.

Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rienika Cipta.

Lalobo, Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Meloeng, Lexy. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Pendit, Nyoman. 2006. *Ilmu Pariwisata*, Bandung: PT Pradnya Paramita.

Putra, Ade,dkk. 2014. *Korelasi Kebudayaan dan Pendidikan: Membangun Pendidikan Berbasis Budaya Lokal*, Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI.

Rahman, 2014.*Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengawasan Mangrove*, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Soewarno. 2003. *Ekonomi Pariwisata, Sejarah Dan Pengelolaannya*. Yogyakarta: Kanisius

Terry. 2000. *Manajemen Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta. GMUP

Yoeti. Oka A. 1995. *Tours and travel management*. Jakarata PT Prandnya Paramita

Dokumen :

Undang-Undang Dasar. Pasal 32 Tahun 1945 Tentang Pemerintah Memajukan Kebudayaan Nasional.

Undang-Undang Pasal 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya
